

IMPLEMENTASI PROGRAM PEMBERDAYAAN FAKIR MISKIN MELALUI SURAT KUASA PENGGUNAAN ANGGARAN

Kajian Kesiapan Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkulu Utara

Muchtar

ABSTRAK

Kajian ini bertujuan memahami implementasi Program Pemberdayaan Fakir Miskin (P2FM) melalui Surat Kuasa Penggunaan Anggaran (SKPA). Jenis kajian deskriptif-kualitatif, dengan teknik pengumpulan data wawancara dan dokumentasi. Analisis data dilakukan melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Informan: aparat Pemda setempat "Satuan Kerja/Satker" P2FM kabupaten, Konsultan Pendamping Pusat yang berkedudukan di kabupaten/kota (KPPKK), dan akademisi dari Perguruan Tinggi setempat. Kajian dilakukan di Kabupaten Bengkulu Utara. Pertimbangannya adalah merupakan salah satu daerah pilot project diimplementasikannya P2FM dari 44 kota/kabupaten di Indonesia (2006). Hasil kajian menunjukkan: (a) hingga saat dilakukan kajian (Pekan ke-empat Oktober 2006), kegiatan P2FM (yang dilakukan oleh Satker kabupaten) masih pada tahap persiapan, yakni (baru) penjajagan lokasi dan pemetaan kebutuhan, serta sosialisasi. Yang dikhawatirkan adalah tidak terselesaikannya rangkaian kegiatan secara baik, yang berujung pada pengembalian dana ke kas negara, sementara masyarakat (fakir miskin) sangat memerlukannya, mengingat waktu sudah di penghujung tahun anggaran (Nop 2006); (b) terbatasnya SDM Satker Kabupaten secara kualitas dan kuantitas. Berdasarkan hasil kajian itu, disarankan agar para pelaku P2FM di daerah (dalam kurun waktu yang masih tersisa (Nop & Des 2006): melakukan percepatan kegiatan program; melakukan dan menjaga hubungan harmonis dengan instansi teknis terkait dan instansi sosial provinsi, yang dalam struktur P2FM tidak terlihat secara jelas peran dan fungsinya; mengusulkan biaya operasional daerah melalui APBD untuk keberlangsungan P2FM. Untuk pelaku P2FM di pusat: konsisten pada waktu dan kegiatan program yang telah dirancangnya; melakukan moneva secara profesional, dan tidak sekedar tour ke daerah, serta pentingnya kajian sebelum implementasi program.

Kata kunci : Implementasi P2FM, SKPA.

I. PENDAHULUAN

Kemiskinan, hingga saat ini tetap menjadi isu global. Menurut Strahm (1999) dalam Muchtar dan Syawie (Jurnal Litbang UKS, 2005), kemiskinan merupakan momok di Dunia Ketiga, karena merupakan masalah sosial terbesar. Dalam konteks Indonesia, penanganan kemiskinan telah sejak lama dilakukan terutama di era Orde Baru melalui rangkaian pembangunan lima tahun(an). Penanganan kemiskinan telah menjangkau seluruh pelosok tanah air. *Out-putnya*, secara kuantitatif menunjukkan hasil yang *significant*, yang terlihat pada data statistik yang memperlihatkan, ketika dimulainya pembangunan Lima Tahun (Pelita) I pada akhir 1960-an, kurang lebih 60% penduduk Indonesia berada di bawah garis kemiskinan, dan kemudian pada akhir

1996-an, menjadi sekitar 12% dari total penduduk Indonesia (BPS, 1997).

Di era Reformasi, setelah Indonesia dilanda krisis moneter (1997), jumlah penduduk miskin Indonesia kembali melonjak naik, yang terlihat pada data BPS per Maret 2006, jumlah penduduk miskin penduduk yang ada dibawah garis kemiskinan mencapai 39,05 juta orang (17,75%) dari 222 juta jiwa penduduk. Jumlah ini naik 3,95 juta orang dari Februari 2005 yang berjumlah 35,10 juta orang (15,97%) (Republika, 2 Sept 2006). Namun demikian, jika saja lebih dicermati, jumlah penduduk miskin dan yang mendekati miskin cukup besar, yaitu: 62 juta orang (Media Indonesia, 1 September 2006).

Salah satu daerah yang diidentifikasi banyak penduduk miskin adalah Provinsi

Bengkulu, dengan jumlah penduduk: 1.640.597 jiwa, yang tersebar di delapan kabupaten dan satu kota ~60 kecamatan, 1.200 desa dan 92 kelurahan~. Mata pencarian mereka pada umumnya petani (di perdesaan) dan nelayan (penduduk di pesisir). Mereka ini pada umumnya penduduk asli (Renstra Dinkesos Prov. Bengkulu, 2006).

Untuk itu, di era Reformasi, khususnya pada Pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, penanganan kemiskinan tetap menjadi agenda besar nasional melalui kebijakan *Triple Track Strategy*, yaitu: *Progrowth* (pertumbuhan), *Projob* (lapangan kerja), dan *Propoor* (rakyat miskin) (Kompas, 19 April 2007:5). Terkait dengan kebijakan *Pro Poor*, mewujud dalam Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM), yang merupakan program penanggulangan kemiskinan, yang pada awalnya merupakan perpaduan antara Program Pengembangan Kecamatan (PPK) yang dilakukan oleh Departemen Dalam Negeri dan Program Pengentasan Kemiskinan Perkotaan (P2KP) yang dilakukan oleh Departemen Pekerjaan Umum. Kedua program tersebut disinergikan dan dikembangkan, yang kemudian dikoordinasikan oleh Kantor Kesejahteraan Rakyat (Media Indonesia, 4 Pebr, 2008). Dalam perkembangan selanjutnya, program-program penanganan kemiskinan di pelbagai lembaga pemerintah diintegrasikan kedalam PNPM, termasuk Program Pemberdayaan Fakir Miskin (P2FM) melalui mekanisme Surat Kuasa Penggunaan Anggaran (SKPA), dimana program ini mempunyai mekanisme, kaidah pelaksanaan, dan manajemen tersendiri sebagaimana telah ditetapkan.

Sebagai program penyempurnaan dari program sebelumnya, P2FM tidak terlepas dari kekurangan. Untuk itu, P2FM melalui SKPA menarik untuk dilakukan kajian, yang hasilnya diharapkan bermanfaat bagi Direktorat Pemberdayaan Fakir Miskin (Dit. PFM) guna penyempurnaan program khususnya di masa yang akan datang.

Bertolak dari latar belakang itu, permasalahan pokok dalam kajian ini adalah bagaimana kesiapan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara dalam implementasi P2FM?. Dengan demikian tujuan kajian ini adalah memahami kesiapan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara dalam implementasi P2FM.

Jenis kajian ini deskriptif-kualitatif, dimana data lapangan mengandalkan pendapat/ persepsi informan. Lokasi kajian adalah Kabupaten Bengkulu Utara yang merupakan salah satu daerah *pilot project* diimplementasikannya P2FM dari 44 kota/kabupaten di Indonesia. Informan ditentukan secara purposive, yakni mereka memahami secara baik obyek kajian. Atas dasar itu, informan terpilih adalah: aparat Pemda setempat (instansi teknis terkait) yang *notabene* sebagai satker P2FM kabupaten, konsultan pendamping pusat yang berkedudukan di kabupaten/kota, dan institusi terkait (Perguruan Tinggi). Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, dan dokumentasi. Analisis data dilakukan melalui tahapan: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

II. GAMBARAN P2FM MELALUI SKPA DAN KABUPATEN BENGKULU UTARA

A. Gambaran P2FM

Program Pemberdayaan Fakir Miskin (P2FM) adalah program yang diusulkan atas dasar komitmen dan inisiatif dari pemerintah kabupaten/ kota ke Departemen Sosial melalui Dinas Sosial provinsi dalam rangka percepatan penanggulangan kemiskinan di wilayahnya.

Tujuan utama:

- a. Meningkatkan kualitas hidup, kemandirian, dan kesejahteraan keluarga fakir miskin;
- b. Pemerintah kabupaten/kota mampu menyinergikan segenap potensi di wilayahnya dalam meningkatkan kesejahteraan keluarga fakir miskin.

Kebijakan:

- a. Pertumbuhan yang berkualitas (*quality growth*). Bertujuan meningkatkan kesejahteraan penduduk miskin yang ditandai oleh menguatnya daya beli penduduk yang didorong oleh terciptanya penghasilan bagi keluarga miskin dan berkurangnya beban pengeluaran keluarga miskin, serta lebih jauh dapat meningkatkan kemandirian keluarga miskin dalam bentuk meningkatnya nilai simpanan/aset keluarga miskin.

- b. Peningkatan akses pelayanan dasar bagi keluarga miskin. Bertujuan meningkatkan kualitas hidup penduduk miskin yang ditandai oleh semakin meningkatnya kehadiran keluarga miskin pada fasilitas dan pelayanan kesehatan dasar, pendidikan wajib belajar, konsumsi pangan dan gizi bermutu, serta semakin mudahnya menjangkau fasilitas tersebut akibat semakin baiknya prasarana dan sarana dasar.
- c. Perlindungan sosial (*social protection*). Bertujuan meningkatkan perlindungan sosial kepada keluarga miskin yang ditandai oleh semakin banyaknya jumlah keluarga miskin yang terjangkau oleh sistem perlindungan sosial, sehingga semakin meringankan beban hidup keluarga miskin di tengah kondisi yang rawan akan perubahan yang sangat berpengaruh terhadap daya beli penduduk miskin.
- d. Pemberdayaan sosial (*community-droven development*). Bertujuan mendorong penduduk miskin secara kolektif terlibat dalam proses pengambilan keputusan termasuk untuk menanggulangi kemiskinan yang dialami mereka sendiri (masyarakat miskin bukan objek, melainkan subjek).

Prinsip:

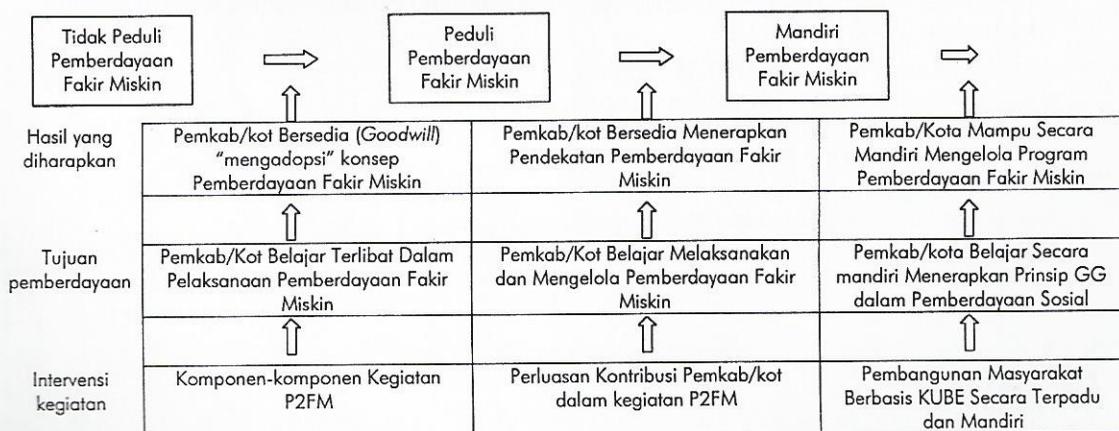
- a. Jujur (dalam proses pengambilan keputusan, pengolahan dana serta pelaksanaan);
- b. Dapat dipercaya (semua pihak yang terkait dengan pelaksanaan P2FM harus menjaga kepercayaan);
- c. Ikhlas/kerelawanan (dalam melaksanakan kegiatan P2FM berlandaskan niat ikhlas, tidak mengharapkan imbalan)
- d. Adil (dalam melaksanakan P2FM harus menekankan azas keadilan kebutuhan nyata kepentingan masyarakat miskin);
- e. Kesetaraan (pelibatan masyarakat pada pelaksanaan, tidak ada diskriminasi);
- f. Kesatuan dalam keragaman (mengoptimalkan gerakan masyarakat melalui kebersamaan dan kesatuan masyarakat).

Kaidah:

- a. Mendorong transformasi sosial dari masyarakat tidak berdaya menuju masyarakat berdaya;
- b. Mendorong transformasi sosial dari masyarakat berdaya menuju masyarakat mandiri;
- c. Mendorong transformasi sosial dari masyarakat mandiri menuju masyarakat madani.

Kaidah pelaksanaan P2FM tersebut, secara lebih jelas terlihat pada gambar 1 berikut:

Gambar 1: Kaidah pelaksanaan P2FM melalui SKPA



Sumber: Panduan P2FM, 2006.

Organisasi:

- a. Unsur Pemerintah:
 1. Direktorat Pemberdayaan Fakir Miskin (pelaksanaan kegiatan P2FM, Pelaksanaan dukungan kebijakan di lingkungan Dit. PFM dalam menjalankan kegiatan P2FM);
 2. Kepala Satuan Kerja Kabupaten Bengkulu Utara (pelaksanaan kegiatan P2FM di Kabupaten Bengkulu Utara, pelaksanaan dukungan kebijakan di Kabupaten Bengkulu Utara dalam menjalankan kegiatan P2FM).
- b. Unsur Konsultan Pendamping, yaitu: (1) Konsultan Pendamping Pusat (KPP) yang berkedudukan di Pusat yang berfungsi: koordinasi, penguatan kelembagaan, moneva, pelaporan, rekomendasi; (2) Konsultan Pendamping Pusat yang berkedudukan di Bengkulu Utara (KPPKK) yang berfungsi : bantuan pelaksana dukungan manajemen proyek di Kabupaten Bengkulu Utara, bantuan pelaksana harian Tim pelaksana program di Kabupaten Bengkulu Utara).
- c. Pendamping Daerah (PD) yang berkedudukan di lokasi proyek (desa/ kelurahan), dengan fungsi: bantuan teknis pemberdayaan sosial kepada KUBE, pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan kepada konsultan pendamping kabupaten).
- d. KUBE (Kelompok Usaha Bersama beranggotakan 10 KK miskin)
- e. Lembaga Keuangan Mikro (LKM) adalah lembaga keuangan yang berfungsi pelayanan pengelolaan keuangan dan pembiayaan untuk kegiatan sosial-ekonomi anggota KUBE dan ditetapkan oleh Bupati berdasarkan aspirasi anggota KUBE.

Manajemen:

Merupakan rangkaian mekanisme yang harus dilakukan secara berurutan dalam rangka penyelenggaraan P2FM, yang meliputi:

- a. Penjajagan lokasi dan pemetaan kebutuhan
- b. Sosialisasi
- c. Identifikasi dan seleksi
- d. Persiapan pelaksanaan kegiatan
- e. Sosialisasi dan workshop P2FM
- f. Pengadaan pendampingan daerah
- g. Sosialisasi dan workshop PFM di kabupaten
- h. Bantuan dana amanah sebagai investasi sosial
- i. Pelatihan teknis tingkat kabupaten
- j. Pembinaan UEP
- k. Moneva
- l. Pelestarian kegiatan
- m. Komponen pendukung pelestarian
- n. Sistem pemeliharaan
- o. Pengendalian
- p. Pemantauan
- q. Pelaporan
- r. Pemeriksaan
- s. Evaluasi
- t. Pengaduan dan penanganan masalah
- u. Pelestarian kegiatan

Secara lebih jelas, manajemen P2FM melalui SKPA terlihat pada tabel 1 berikut:

Tabel 1: Manajemen P2FM melalui SKPA

No.	Jenis Kegiatan	Output	Tenggat Waktu	Pelaksana
1	Workshop Nasional	Tersusunnya Pedum P2FM	30-31 Agt 2006	Dit. PFM
2	Mobilisasi Konsultasi nasional & Kab/Kota	Para tenaga ahli sudah dapat bekerja sesuai tupoksinya	1-4 Sept 2006	Perusahaan, KPP, Satker, Dit. PFM
3	Sosialisasi kegiatan di lokasi PFM	Memahami latar belakang, tujuan, prinsip, kebijakan, dan tahapan P2FM	4-9 Sept 2006	PD, Tim Dinsos Kab/Kota, Kp2K2
4	Pendataan kelompok sasaran (KUBE)	Adanya data kelompok sasaran (KUBE) yang akurat, terbentuknya KUBE, LKM, dan KUBE keg produktif	4-9 Sept 2006	Tim Dit. PFM, KPP, Satker Kab/Kota, Tim Dinso Kab/Kota
5	Seleksi Pendamping Daerah (PD)	Adanya tenaga profesional pendamping lokal (KUBE)	4-10 Sept 2006	Satker daerah, KP2K2
6	Pelatihan dan worrkshop Kab/Kota	Memahami latar belakang, tujuan, prinsip, kebijakan dan tahapan P2FM. Mengetahui & melaksanakan peran & tugasnya	11 Sept 2006	Satker Kab/Kota, KP2K2, Tim Dit. PFM
7	Mobilisasi PD	Para fasilitator sudah mulai bekerja	12-13 Sept 2006	Satker Kab/Kota KP2K2
8	Penyusunan usulan KUBE	Adanya usulan KUBE definitif	14-18 Sept 2006	PD, Tim Dinso Kab/Kota, KP2K2
9	Permohonan pencairan dana Amanah	Adanya dokumen pencairan dana amanah yang disampaikan KUBE LKM kepada Satker Daerah. Persyaratan adalah adanya proposal dari KUBE yang telah diverifikasi oleh PD & Tim Dinso Kab/Kota	19-20 Sept 2006	PD, KP2K2, Tim Dinsos Kab/Kota
10	Pencairan dana Amanah	Tersalurkannya dana amanah ke rekening KUBE LKM	20-22 Sept 2006	Satker Daerah
11	Pencairan dana Amanah ke anggota KUBE produktif	Tersalurkannya dana amanah ke anggota KUBE	22-24 Sept 2006	KUBE, PD, Tim Dinsos Kab/Kota, KP2K2
12	Penyebaran Juknis kegiatan P2FM	Juknis diterima & dapat digunakan dengan baik oleh anggota KUBE dalam melaksanakan kegiatan P2FM	14-25 Sept 2006	KPP, Tim Dit. PFM
13	Pelaksanaan kegiatan P2FM	Terlaksananya kegiatan yang diusulkan oleh KUBE produktif	22 sept-22 Des 2006	KUBE, PD, Tim Dinsos Kab/Kota
14	Monitoring & supervisi	Adanya data pelaksanaan yang akurat	Berkala	-
15	Pelaporan	Adanya informasi tertulis dari lokasi P2FM bersisi perkembangan kegiatan, masalah, penyelesaian masalah, dan rencana tindak lanjut	Berkala	-
16	Evaluasi nasional	Tersusunnya perbaikan program PFM, secara administrasi, program dan rencana tindak lanjut P2FM	23-24 Des 2006	Dit. PFM

Sumber: Panduan P2FM, 2006.

Manfaat :

- a. Dana amanah (dana investasi sosial dalam bentuk uang tunai yang ditransfer kepada KUBE melalui rekening kolektif KUBE, yang hanya dipergunakan untuk membiayai kegiatan usaha ekonomi produksi (UEP)).
- b. Bantuan teknis, yaitu: (1) manajemen (dalam bentuk konsultan manajemen dari unsur KPP dan KPPKK, yang fungsinya memberikan bantuan teknis manajemen kepada Tim Pelaksana Program dan bantuan teknis manajemen kepada PD); (2) pemberdayaan sosial (bantuan dalam bentuk personil PD yang fungsinya memandu KUBE menyelenggarakan kegiatan sosial ekonomi mereka).

Sasaran :

- a. Penduduk fakir miskin yang termasuk dalam Daftar Rumah Tangga Miskin (RTM)
- b. Penduduk fakir miskin yang diverifikasi secara swadaya oleh anggota masyarakat sendiri bahwa yang bersangkutan benar-benar RTM.
- c. Penduduk fakir miskin yang tidak mempunyai pekerjaan tetap, namun didaerahnya terdapat sektor andalan: perikanan, pertanian, peternakan, perdagangan dan jasa, industri rumah tangga, dan kegiatan ekonomi lainnya yang menggunakan alat pengolahan teknologi sederhana.

B. Deskripsi Kabupaten Bengkulu Utara

Kabupaten Bengkulu Utara dengan ibu kota Arga Makmur merupakan salah satu wilayah Provinsi Bengkulu, memiliki luas wilayah 5.548,54 Km². Jumlah penduduknya sekitar 346.567 jiwa/74.861 KK, dimana 32.616 KK (43,57%) termasuk kategori keluarga miskin. Mereka terdiri dari suku asli (Rejang, Pekal, Melayu, Enggano, Lembak) dan pendatang (Jawa, Sunda, Minang, Batak dan lainnya). Mata pencarian sebagian besar mereka (78%) adalah petani (Pemerintah Kab. Bengkulu Utara, 2006).

Secara administratif, Kabupaten Bengkulu Utara terdiri dari 18 kecamatan ~304 desa definitif, dimana 166 desa (55%)~ dalam kelompok desa miskin. Batas Kabupaten

Bengkulu Utara dengan daerah di sekitarnya: sebelah utara Kabupaten Muko-Muko, sebelah selatan Kabupaten Bengkulu Selatan dan Kota Bengkulu, sebelah timur Provinsi Jambi, Kabupaten Rejang Lebong, serta sebelah barat Samudera Indonesia. Secara geografis, Bengkulu Utara terletak antara 101°32'-102°8' BT dan 2°15'-4° LS, dimana sebagian besar wilayahnya merupakan dataran rendah dengan ketinggian dibawah 150 m diatas permukaan laut, dan secara topografis, struktur tanahnya bergelombang dan berbukit dengan tingkat kesuburan tanah antara rendah hingga sedang (ibid).

Sesuai kondisi geografis seperti dikemukakan, potensi alam yang memungkinkan dikembangkan adalah sektor pertanian, peternakan, perikanan darat dan laut, perkebunan, jasa serta industri kecil (ibid). Selanjutnya, Potensi dan sumber kesejahteraan sosial (PSKS) yang tersedia dan potensial dikembangkan adalah: Karang Taruna, Organisasi Sosial, Wahana Kesejahteraan Sosial Lokal (paguyuban, dan lain-lain), Tenaga Kesejahteraan Sosial Masyarakat, dan Dunia Usaha (Renstra Distranakersos, 2006).

Penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) yang menonjol di Bengkulu Utara terlihat pada tabel 2 berikut:

Tabel 2: Jenis PMKS yang menonjol di Kabupaten Bengkulu Utara

NO	JENIS PMKS	JUMLAH
1	Keluarga berumah tak layak huni	2.959 KK
2	Keluarga fakir miskin	2.836 KK
3	Lanjut usia terlantar	2.232 orang
4	Anak terlantar	2.017 orang
5	KAT	1.803 orang
6	Wanita rawan sosial ekonomi	1.745 orang

Sumber: Renstra Dinas Transmigrasi, Tenaga Kerja, dan Sosial Bengkulu Utara, 2006.

Mencermati bahwa permasalahan pokok penduduk Kabupaten Bengkulu adalah kemiskinan, maka Pemda setempat menjadikan penanganan kemiskinan sebagai penekanan utama program pembangunan daerah. Kesungguhan Pemda itu terlihat dengan telah dibentuknya Komisi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (KPKD), yaitu suatu lembaga yang mempunyai tugas utama

menangani kemiskinan yang terdiri dari instansi teknis terkait di daerah termasuk Dinas Transmigrasi, Tenaga Kerja, dan Sosial (Distranakersos), yang dikoordinasikan oleh Kantor Pemberdayaan Masyarakat.

Tingginya angka kemiskinan di Kabupaten Bengkulu Utara merupakan sebab akibat dari tingkat pendidikan penduduk yang rendah, yaitu 31,5% tidak tamat SD, 38% tamat SD, dan selebihnya (15,5% berpendidikan SLTP, 10% berpendidikan SLTA, 5% berpendidikan perguruan tinggi), serta angka harapan hidup yang relatif lebih rendah (60 tahun) di bawah harapan hidup rata-rata nasional (68 tahun). Karakteristik keluarga miskin di Kabupaten Bengkulu Utara adalah tinggal di perdesaan dengan mata pencarian sebagai petani (78% dari total penduduk).

III. HASIL KAJIAN DAN PEMBAHASAN

A. Implementasi P2FM

Hasil wawancara dengan Ketua Satker Kabupaten Bengkulu Utara diperoleh informasi, secara organisatoris baru terbentuk sebagian pelaku P2FM di daerah, yaitu: (a) Satker kabupaten, (b) KUBE di sembilan desa dua kecamatan melalui Surat Keputusan Bupati Bengkulu Utara, dan (c) KPPKK. Dengan demikian, pelaku P2FM di Kabupaten Bengkulu Utara yang belum terbentuk adalah (seleksi petugas) Pendamping Daerah (PD) yang berasal dari: Orsos/LSM, PSM, TKSM; anggota KUBE; dan pengurus LKM. Kegiatan yang dilakukan oleh Satker-pun (masih) pada tahap persiapan, yaitu: (a) peninjauan lokasi dan pemetaan kebutuhan (yang dilakukannya bersama instansi terkait setempat); (b) sosialisasi (penjelasan oleh Dit. P2FM kepada instansi sosial kabupaten, dan pihak terkait lainnya).

Selanjutnya, secara managerial, (baru) dilakukan peninjauan lokasi dan pemetaan kebutuhan, sosialisasi kepada pihak-pihak terkait. Kegiatan-kegiatan tersebut dilakukan sepenuhnya oleh Satker kabupaten yang notabene adalah Distranakersos dan khususnya bidang kesejahteraan sosial bersama pelaku P2FM di daerah (KPPKK, Perguruan Tinggi setempat) dan instansi teknis terkait (Dinas Peternakan) tanpa keterlibatan instansi sosial

provinsi. Dengan demikian, secara managerial, kegiatan yang belum dilakukan setidaknya meliputi:

- a. Identifikasi dan seleksi keluarga binaan sosial/KBS.
- b. Pelatihan teknis di kabupaten (pembekalan kepada KUBE dalam mengelola UEP, yang difasilitasi oleh KPPK).
- c. Pencairan bantuan dana Depsos melalui SKPA.
- d. Pembinaan usaha ekonomis produktif/UEP.
- e. Monitoring dan evaluasi.
- f. Mengusulkan dana pendampingan kepada Bupati melalui APBD untuk keberlanjutan P2FM.

Mengacu kepada Buku Panduan P2FM (2006), segyanya serangkaian kegiatan P2FM di daerah, seperti: seleksi PD, pelatihan dan workshop kabupaten, mobilisasi PD, penyusunan usulan KUBE, permohonan pencairan dana amanah, pencairan dana amanah, pencairan dana amanah ke anggota KUBE produktif, harus sudah dilaksanakan hingga bulan Oktober (2006). Persiapan yang masih minim tersebut (periksa gambaran P2FM item organisasi) menurut Ketua Satker yang dikuatkan oleh KPPKK dan akademisi dari Universitas Bengkulu sebagai pendamping disebabkan oleh keterlambatan (aparatur) pusat (Dit. PFM) dalam melakukan kegiatan P2FM ke daerah. Dengan demikian, masih banyak kegiatan-kegiatan yang perlu dilakukan (periksa gambaran P2FM item manajemen), dalam waktu yang masih tersisa (bulan Nopember-Desember 2006).

B. Kendala dan Upaya Mengatasinya

Menurut Ketua Satker, kendala yang ditemui dalam implementasi P2FM di Kabupaten Bengkulu Utara, antara lain: pertama: keterlambatan dimulainya (starting) kegiatan P2FM oleh petugas pusat (Dit. PFM), sehingga berdampak pada keterlambatan operasionalisasi kegiatan P2FM di daerah; Kedua: terbatasnya SDM Satker Kabupaten Bengkulu Utara. Gambarnya adalah secara struktural, bidang kesejahteraan sosial hanya terwadahi dalam satu bidang (kesejahteraan sosial) dan dua seksi (rehabilitasi dan penanganan masalah sosial, serta kesejahteraan sosial dan bantuan bencana).

Secara kuantitas, pada bidang tersebut hanya terdapat lima orang pegawai, dan secara kualitas tidak ada yang berlatar pendidikan kesejahteraan sosial (kendala internal). Ketiga: tidak dilakukannya workshop P2FM bagi para pelaku P2FM di daerah sebagai salah satu upaya penyatuan pemahaman dan persepsi terhadap program antara pelaku P2FM pusat dan daerah (Satker dan pihak lainnya) sebagai langkah awal sosialisasi program sebagaimana telah dirancang. Penjelasan Ketua Satker tersebut dikuatkan oleh KPPKK dan pendamping dari Universitas Bengkulu (Unib).

Untuk mengatasi kendala SDM, Ketua Satker yang notabene juga Kepala Dinas Transnakersos akan memanfaatkan SDM bidang lain (Transmigrasi dan Tenaga Kerja).

Sedangkan seleksi akan dilakukan dengan ketat, transparan, dan partisipatif untuk mengurangi kerawanan konflik horizontal (antar warga). Dalam pengelolaan UEP, akan dilakukan secara fleksibel untuk mengurangi saling ketergantungan antar anggota KUBE. Untuk itu akan diupayakan setiap anggota KUBE akan mengelola UEP secara mandiri, tetapi secara manajerial tetap dalam ikatan kelompok. Sedangkan dengan tiadanya workshop program di tingkat pusat sebagai langkah awal sosialisasi program, cara yang dilakukan para pelaku P2FM di daerah adalah dengan cara membaca/memahami buku panduan, dan diskusi dengan aparat pusat ketika mereka melakukan aktivitas ke daerah.

Berdasarkan pembahasan seperti dikemukakan, dapat dicermati pada tabel 3 berikut:

Tabel 3: Capaian dalam implementasi P2FM melalui SKPA di Kabupaten Bengkulu Utara (Nopember 2006).

ORGANISASI		MANAJEMEN	
Panduan P2FM	Capaian	Panduan P2FM	Capaian
<ul style="list-style-type: none"> • Satker Kabupaten • KPPK • Pendamping • KUBE • LKM 	<ul style="list-style-type: none"> • Satker Kabupaten • KPPKK 	<ul style="list-style-type: none"> • Penjajagan lokasi dan pemetaan kebutuhan • Sosialisasi • Identifikasi dan seleksi • Persiapan pelaksanaan kegiatan • Sosialisasi dan workshop P2FM • Pengadaan pendampingan daerah • Sosialisasi dan workshop PFM di kabupaten • Bantuan dana amanah sebagai investasi sosial • Pelatihan teknis tingkat kabupaten • Pembinaan UEP • Moneva • Pelestarian kegiatan • Komponen pendukung pelestarian • Sistem pemeliharaan • Pengendalian • Pemantauan • Pelaporan • Pemeriksaan • Evaluasi • Pengaduan dan penanganan masalah • Pelestarian kegiatan 	<ul style="list-style-type: none"> • Penjajagan lokasi dan pemetaan kebutuhan • Sosialisasi

Sumber: Olahan hasil kajian

Matrik tersebut menunjukkan bahwa capaian kegiatan yang dilakukan oleh Satker Kabupaten Bengkulu Utara masih pada tahapan persiapan. Kecenderungannya adalah waktu yang tersisa (Nopember dan Desember 2006) tidak memungkinkan dilakukan percepatan operasionalisasi kegiatan dilapangan. Keterbatasan waktu operasionalisasi dilapangan tersebut diperparah oleh keterbatasan SDM secara kualitas dan kuantitas. Dengan demikian, dampaknya adalah tujuan program (periksa gambaran P2FM item tujuan) terancam gagal.

IV. KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan pembahasan seperti dikemukakan dapat disimpulkan bahwa tujuan P2FM yakni keberdayaan fakir miskin di Kabupaten Bengkulu Utara (sembilan desa, dua kecamatan) terancam gagal karena (masih) minimnya operasionalisasi kegiatan dilapangan sebagai akibat terlambatnya starting kegiatan P2FM petugas pusat.

Mencermati masih minimnya kegiatan yang dilakukan, kendala SDM disarankan:

1. Agar Satker Kabupaten Bengkulu Utara dalam kurun waktu yang masih tersisa (Nopember-Desember 2006) untuk:
 - a. Melakukan percepatan kegiatan sesuai tahapan yang telah ditentukan, seperti: seleksi petugas PD dari unsur Orsos/LSM, PSM, TKSM; anggota KUBE; dan pengurus LKM (organisatoris), dan secara managerial antara lain: identifikasi dan seleksi keluarga binaan sosial/KBS, pelatihan teknis di kabupaten (pembekalan kepada KUBE dalam mengelola UEP) dan lainnya.

- b. Melakukan dan menjaga hubungan yang harmonis baik secara horizontal dengan instansi teknis terkait maupun secara vertikal dengan instansi sosial provinsi, dimana secara program (Struktur P2FM) tidak terlihat secara jelas peran dan fungsinya, bahkan ada kesan ditinggalkan, maupun dengan anggota KUBE/KBS (masyarakat).
- c. Mengusulkan biaya operasional daerah melalui APBD untuk tahun 2007 kepada Bupati untuk keberlangsungan P2FM, mengingat adanya sanksi yang tegas, yaitu jika karena sesuatu hal, P2FM terlantarkan, tidak bermanfaat bagi keluarga miskin (gagal), maka diwaktu yang akan datang, kepada daerah tersebut tidak akan ada alokasi P2FM lagi.

2. Untuk pelaku P2FM di pusat:

- a. Konsisten pada waktu dan kegiatan yang telah dirancangnya. Ketidak-konsistenan itu setidaknya terlihat dari tidak ditepatinya waktu yang telah dijadwalkan dan tidak dilakukannya workshop di pusat sebagai langkah awal penyatuan pemahaman antara pelaku P2FM di pusat dan di daerah. Langkah awal (pemahaman secara baik terhadap program) ini menjadi penting, karena munculnya berbagai permasalahan ketika implementasi program, bermula dari ketidak/kekurangfahaman antar para pelaku sendiri.
- b. Melakukan moneva secara profesional, dan tidak sekedar tour ke daerah.
- c. Perlu kajian sebelum implementasi program (program berbasis riset).

DAFTAR PUSTAKA

- BPS kerjasama dengan Depsos R.I. 2003. *Penduduk Fakir Miskin 2002*, Jakarta.
- Departemen Sosial RI, 2006. *Pedoman Umum Program Pemberdayaan Fakir Miskin*, Jakarta: Ditjen Pemberdayaan Sosial
- Komite Penanggulangan Kemiskinan. 2003. *Buku Pedoman Komite Penanggulangan Kemiskinan*, Jakarta: Sekretariat KPK.

Kompas. 19 April 2007. *Mengarahkan Haluan, Menjinakkan Kemiskinan.*

Kabupaten Bengkulu Utara, Dinas Transmigrasi, Tenaga Kerja, dan Sosial. 2005. *Renstra 2006-2011.*

Muchtar dan M. Syawie. 2005. *Strategi Pemberdayaan Berbasis Kelembagaan Lokal dalam Penanganan Kemiskinan Perkotaan.* Jurnal, Puslitbang UKS.

Media Indonesia, 4 Pebr, 2008.

Provinsi Bengkulu, Dinas Kesejahteraan Sosial. 2006. *Renstra 2006-2010.*

Republika, 2 Sept 2006.

BIODATA PENULIS :

Muchtar, Peneliti pada Pusat Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial, Badan Pendidikan dan Penelitian Kesejahteraan Sosial, Departemen Sosial RI.